



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JHON MARTHIN**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**
3. NHK : **903610**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **21.540.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 10.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 3.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 2.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/370 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 5.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, Rp. 840.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **710.600.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2014, HADIAH Rp. 250.000.000
2. MOBIL, FORD EVEREST 4X4 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 250 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA KIRANA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 8.600.000



5. MOTOR, KAWASAKI VERSYS 650 Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 106.000.000

6. MOTOR, YAMAHA XJ900P DIVERSION Tahun 2001, HASIL
SENDIRI Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 162.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 22.487.600.000

III. HUTANG Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 22.467.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.